

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedagang kaki lima/PKL merupakan usaha dengan modal relatif sedikit untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu, pada lokasi strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima termasuk dalam sektor informal karena memiliki karakteristik dan kekhasan dalam pengelolaan aktivitas maupun cara berlokasinya. PKL juga memiliki cara tersendiri dalam pengelolaan modal yang ditujukan untuk bertahan hidup. Pengelolaan modal tersebut tidak hanya berwujud modal ekonomi yang berbentuk *real* tetapi juga modal lokasional yang menjadi salah satu pendukung dari keberhasilan usaha PKL tersebut. PKL dianggap sebagai suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara berkembang terutama bertujuan mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan (Hiyastuti, 2006). Pada negara berkembang, PKL merupakan subgroup terbesar dengan representasi antara 10 -35% dari pekerja non pertanian sedangkan di negara maju, sektor ini hanya merepresentasikan hanya 5 % dari pekerja non pertanian (ILO, 2002). Sektor ini mampu menyerap sejumlah 77,9 % pekerja sektor non pertanian di Indonesia dan 66,9 % di Fillipina (Recio dan Gomez, 2013). Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mencatat hingga tahun 2012 terdapat 23,4 juta pedagang kaki lima di seluruh Indonesia (Tempo.com, 5/9/2012). Kondisi tersebut mendorong para PKL sangat produktif dan kreatif agar mampu bertahan dalam perkembangan kota, termasuk dalam pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat dalam sektor industri dan persiapan teknologi impor yang padat modal dalam keadaan kelebihan tenaga kerja (Bromley dalam Alisjahbana, 2005).

Di sisi lainnya, keberadaan pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan permasalahan kesemrawutan, masalah estetika, masalah ketertiban dan kebersihan, masalah lalu lintas serta berbagai permasalahan perkotaan lainnya. Pada negara

berkembang seperti di Asia Tenggara, keberadaan PKL sering terdiskriminasi sebagai *unappreciated role* karena keberadaannya mengokupansi ruang publik (Recio dan Gomez, 2013). Problema lokasi bagi usaha pedagang kaki lima di perkotaan, tampaknya menjadi sentra yang melatarbelakangi masalah dari pedagang kaki lima tersebut. Kebutuhan akan lokasi menjadi sesuatu yang logis karena tumpuan aktivitas sektor ini memang lebih banyak kepada perdagangan fisik. Proses perencanaan tata ruang, sering kali belum mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan ruang untuk PKL. Ruang-ruang kota yang tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan kegiatan dan fungsi formal saja. Kondisi ini yang menyebabkan para Pedagang Kaki Lima berdagang di tempat-tempat yang tidak terencana dan tidak difungsikan untuk mereka. Akibatnya mereka selalu menjadi obyek penertiban dan pemerasan para petugas ketertiban serta menjadikan kota berkesan semrawut (Syamsuhilal, 2013).

Kebijakan pemerintah sebaiknya tidak hanya memarginalkan keberadaan PKL di sudut kota saja tetapi harus mampu mengintegrasikan keberadaannya di dalam ruang kota dan manajemen ruang selaras dengan pembangunan yang ada (Kusakabe, 2006). Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya akomodatif - promotif dengan pemberian bantuan berupa modal maupun pembinaan (Mustafa, 2008). Salah satu bentuk upaya akomodatif yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyediakan ruang yang difungsikan untuk menampung aktivitas para PKL baik dengan pengaturan aktivitas maupun formalisasi aktivitas PKL. Pengaturan aktivitas PKL dan formalisasi aktivitas PKL umumnya dilakukan di perkotaan sedangkan pedagang tradisional di pedesaan tidak banyak diatur oleh pemerintah. Pengaturan aktivitas dilakukan dengan manajemen waktu dan pengaturan fungsi jalan untuk mendukung aktivitas PKL, sedangkan formalisasi aktivitas PKL mulai diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan PKL pada berbagai kota di Indonesia, termasuk pada Kota Semarang.

Di Kota Semarang, formalisasi PKL telah dilakukan sebelumnya pada beberapa lokasi seperti pada Simpang Lima Semarang yang mengalami keberhasilan. Para pedagang telah mengalami formalisasi yang diindikasikan berdasar pada kriteria sarana berdagang dan tempat usaha, organisasi, omzet serta kualitas barang yang

terjamin (Surya, 2013). Mulanya, kawasan Simpang Lima dipenuhi oleh PKL yang berjualan dengan menggunakan tenda dan gelaran seadanya sehingga mengganggu visualisasi kawasan dan merusak citra kawasan Simpang Lima. Namun, setelah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah - PKL - masyarakat, maka proses formalisasi dengan pengorganisasian PKL dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kawasan tersebut.

Formalisasi PKL lainnya di Kota Semarang terdapat pada kawasan Pasar Waru. Berdasar RTRW Kota Semarang tahun 2011 - 2031, pasar Waru merupakan area resmi untuk berjualan PKL yang bagian belakangnya dialokasikan untuk pedagang klithikan. Pada dasarnya, Pasar Waru sendiri merupakan pasar tradisional berskala lingkungan yang memiliki skala pelayanan di sekitar kecamatan saja. Namun, dengan adanya perbaikan Jalan Kartini dan pelebaran Jalan Citarum, maka PKL klithikan yang ada dipindahkan pada bagian belakang pasar Waru. Dengan kondisi bangunan yang semi formal dimaksudkan agar tidak menghilangkan karakteristik pedagang kaki lima namun berlokasi pada area yang diperbolehkan oleh pemerintah. Pedagang pasar ini berasal dari berbagai daerah di Kota Semarang khususnya Citarum- Progo- Kartini yang kemudian dialokasikan pada *center* tertentu untuk memudahkan pengelolaan serta menarik konsumen.

Dalam formalisasi PKL, faktor lokasi menjadi salah satu penentu keberhasilan dan keberlangsungan aktivitas PKL ke depannya. Lokasi akan berpengaruh terhadap nilai tanah berdasarkan kemampuan ekonomis dan produktivitasnya dari segi letak yang strategis ekonomis (Ernawati, 2005). Oleh karena itu, pengelompokan kegiatan seperti perdagangan dan aktivitas lainnya di suatu tempat akan mempengaruhi nilai tanah disekitarnya. Lokasi dapat menjadi suatu modal yang berperan penting bagi PKL karena pendapatan PKL bergantung pada produk yang dijual, volume dan jangka waktu berjualan pada lokasi tertentu (Saha, 2011).

Suatu kegiatan informal pada dasarnya harus memiliki suatu lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan (profit) yang lebih banyak dari tempat lain. Penentuan lokasi yang sesuai menurut pemerintah pada umumnya memiliki perbedaan dengan PKL. Penetapan lokasi PKL oleh pemerintah dilakukan dengan

memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Permendagri Nomor 41 Tahun 2012). Sedangkan penentuan lokasi oleh PKL dalam menjalankan aktivitasnya mempertimbangkan akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, di sepanjang hari. Pada umumnya, pedagang kaki lima memilih suatu lokasi sebagai tempat berjualannya karena didasarkan pada faktor aksesibilitas yakni kemudahan di dalam mencapai lokasi tersebut serta faktor *proximity* (kedekatan) baik itu kedekatan pedagang dengan rumah sehingga mudah dalam membawa pulang dagangannya ataupun kedekatan dengan konsumen.

Formalisasi PKL Kawasan Pasar Waru dianggap kurang sesuai bagi PKL karena ketidaksesuaian lokasi berjualan. Kawasan Pasar Waru memiliki aksesibilitas yang rendah karena sulit dijangkau menggunakan transportasi umum. Para pedagang yang berasal dari berbagai daerah di Kota Semarang juga menganggap bahwa lokasi Pasar Waru jauh dari konsumen karena tidak berada pada pusat kota sehingga konsumen kesulitan dalam menjangkaunya. Hal ini mengakibatkan hambatan pada aktivitas PKL sehingga mengakibatkan kerugian pada PKL. Padahal di sisi lain, lokasi ini merupakan lokasi potensial resmi yang ditetapkan oleh pemerintah yang khusus disediakan bagi pedagang klithikan dengan skala pelayanan tingkat kota atau lebih. Kondisi ini mengakibatkan banyak PKL yang memilih untuk meninggalkan loss dan berjualan pada lokasi yang dianggap strategis menurut PKL.

Pada akhirnya, keberadaan Pasar Waru sebagai kawasan resmi oleh pemerintah dianggap belum mampu mengoptimalkan salah satu sumber pendapatan daerah karena banyaknya *dead capital* sehingga pendapatan retribusi berkurang dari pedagang yang semula berjualan menjadi pindah pada lokasi lain yang dianggap strategis. Apabila Pasar Waru dapat dioptimalkan maka akan mampu menarik investasi lebih bagi perkembangan kawasan sekitarnya termasuk meningkatkan harga lahan yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan pengkajian untuk mengetahui peranan formalisasi PKL kawasan Pasar Waru khususnya dalam pengelolaan modal secara lokasional sebagai bentuk upaya pengembangan serta penataan aktivitas PKL di Kota

Semarang. Adanya formalisasi tersebut merupakan potensi sekaligus tantangan yang dapat digunakan untuk keberlanjutan aktivitas PKL dalam menghadapi tantangan masa mendatang. Apabila proses formalisasi berhasil diterapkan maka dampak negatif akibat keberadaan PKL dapat diminimalisasikan sehingga potensi PKL dapat menjadi optimal.

1.2 Perumusan Masalah

Keberadaan pedagang kaki lima telah melekat dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya titik tolak timbulnya permasalahan pedagang kaki lima sebagai sektor informal di lingkungan perkotaan adalah kebutuhan ruang dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini terlihat dari kehadirannya yang menempati ruang-ruang umum atau teritorial bangunan. Di sisi lainnya, pedagang kaki lima memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi, apabila ditata dengan baik akan berpotensi besar dan layak untuk dijadikan obyek wisata yang menjadi magnet kunjungan masyarakat luas dan membentuk identitas kota.

Dalam kebijakan mengenai PKL, terdapat peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031 yang didalamnya berisi larangan PKL untuk berjualan di tempat umum seperti sempadan, taman serta ruang terbuka publik lainnya. Pemerintah membagi PKL berdasar lokasi berjualan menjadi PKL tertata dan tidak tertata, dimana PKL tidak tertata merupakan PKL yang berjualan di luar lokasi ketetapan SK Walikota. Oleh karena itu, pemerintah membangun beberapa lokasi resmi, salah satunya yakni Pasar Waru di Jalan Kaligawe untuk menampung aktivitas PKL. Pada tahun 2007, Pasar Waru dipersiapkan untuk menampung pindahan pedagang dari Jalan Kartini, Kokrosono dan berbagai daerah lainnya dengan spesialisasi barang dagangan yakni produk kerajinan dan klithikan.

Banyak PKL berjualan di Pasar Waru yang berasal dari Kota Semarang maupun pendatang dari luar Kota Semarang. Adanya potensi Pasar Waru sebagai pusat produk kerajinan tidak sejalan dengan kondisi yang ditemui pada kawasan tersebut. Beberapa penyebab permasalahan secara fisik yakni lokasinya yang dianggap kurang

strategis karena terlalu jauh dan aksesibilitas yang rendah serta seringnya terjadi banjir menyebabkan pembeli bahkan pedagang enggan menuju lokasi ini sehingga aktivitas jual beli yang ada di Pasar Waru tidak seramai dengan lokasi PKL lainnya meskipun pada hari libur atau hari besar (hasil wawancara, 2013). Akibatnya, secara ekonomi, para pedagang banyak yang merugi karena pendapatan yang dihasilkan tidak mampu *mencover* pengeluaran atas sewa tempat, modal, biaya transportasi dan *cost* lainnya sehingga banyak pedagang yang memilih untuk pindah dan kembali berjualan di lokasi semula termasuk pada lokasi larangan. Hal ini menyebabkan daya saing Pasar Waru menjadi rendah padahal lokasi ini menjadi lokasi resmi yang direkomendasikan oleh pemerintah.

Adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PKL melalui formalisasi belum dirasakan langsung oleh PKL itu sendiri. Munculnya dilema baru bagi PKL menjadi permasalahan tersendiri yang masih ada hingga saat ini. Pasar Waru menjadi salah satu lokasi formal berjualan PKL yang dikelola oleh pemerintah sehingga lokasi ini telah memiliki kelebihan khususnya dalam hal *security* sehingga para pedagang tidak perlu kesulitan untuk berpindah tempat atau terancam mengalami penggusuran. Secara legal, terjadi peningkatan status dari PKL menjadi pedagang pasar di bawah wewenang Dinas Pasar. Namun, peningkatan status legal ini tidak diimbangi dengan hak pedagang pada umumnya khususnya mengenai ketersediaan sarana prasarana. Pada kawasan Pasar Waru, sarana prasarana yang digunakan oleh pedagang masih sama seperti PKL yakni tempat berjualan yang masih seadanya. Kondisi ini diperparah dengan kejadian kebakaran yang mengakibatkan aktivitas di kawasan tersebut sempat mati suri. Oleh karena itu penelitian ini menghasilkan suatu research question mengenai formalisasi di Pasar Waru, yakni “Sejauh mana peranan keberhasilan formalisasi dalam aktivitas PKL di Pasar Waru Semarang?”.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan Studi

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana peranan formalisasi di Kawasan Pasar Waru Semarang untuk mendukung aktivitasnya.

1.3.2. Sasaran Studi

Dalam rangka pencapaian tujuan di atas, maka sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi karakteristik dan kondisi PKL di Kawasan Pasar Waru Semarang.
2. Menganalisa kesesuaian lokasi aktivitas PKL Kawasan Pasar Waru Semarang.
3. Menganalisa karakteristik formalisasi PKL di Kawasan Pasar Waru Semarang.
4. Menganalisa manfaat formalisasi dalam PKL Kawasan Pasar Waru Semarang.

1.4 Lingkup Studi

Lingkup studi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yakni lingkup materi dan lingkup wilayah. Lingkup materi merupakan isi dari pembahasan penelitian secara keseluruhan sedangkan lingkup wilayah merupakan lokasi dan batasannya sebagai wilayah untuk penelitian.

1.4.1. Lingkup Materi

Pembahasan materi yang ada pada penelitian ini mencakup peran formalisasi dalam aktivitas PKL khususnya pada lokasi bentukan pemerintah, yang dijabarkan sebagai berikut :

- Kajian kesesuaian lokasi aktivitas formal PKL di Kawasan Pasar Waru Semarang Kesesuaian lokasi kawasan Pasar Waru Semarang ditinjau berdasarkan kebijakan rencana tata ruang yang ada dengan penggunaan lahan eksisting yang ada di

kawasan tersebut. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai kesesuaian lokasi yang didasarkan pada *demand – supply* yang ada serta fungsi dari keberadaan Kawasan Pasar Waru tersebut.

- Kajian Karakteristik formalisasi PKL di Kawasan Pasar Waru Semarang.
Karakteristik PKL di suatu lokasi akan berbeda dengan lokasi lainnya. Karakteristik formalisasi PKL yang dibahas dalam penelitian ini mencakup karakteristik berjualan PKL secara formal baik secara lokasionalnya maupun aktivitasnya. Karakteristik PKL meliputi waktu berjualan, sarana yang digunakan untuk berjualan, jenis barang dagangan yang diperjualbelikan hingga kondisi aktiivitas PKL yang ada di Pasar Waru Semarang.
- Kajian manfaat formalisasi dalam aktivitas PKL di Kawasan Pasar Waru Semarang
Kajian ini berisi mengenai peranan atau manfaat formalisasi bagi aktivitas pedagang baik untuk saat ini maupun ke depannya termasuk didalamnya berisi mengenai manfaat dan kelebihan formalisasi sehingga mampu menunjang aktivitas pedagang di Kawasan Pasar Waru Semarang.

1.4.2. Lingkup Wilayah

Wilayah studi yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kawasan Pasar Waru yang merupakan lokasi formal pedagang kaki lima di Semarang berdasar RTRW tahun 2011- 2031 yang telah mengalami peningkatan status menjadi pedagang. Lokasi Pasar Waru terletak di Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari. Batas wilayah studi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Utara : Kelurahan Kaligawe

Selatan: Kelurahan Kaligawe

Barat : Jalan Sawah Besar dan sungai Banjir Kanal Timur

Timur : kawasan Rusunawa Pasar Waru



Sumber : Analisis Penyusun, 2014

**GAMBAR 1.1.
WILAYAH AMATAN**

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian bertujuan untuk menghindari plagiasi terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini dengan membandingkan antara lokasi penelitian

sebelumnya, tujuan penelitian sebelumnya, materi penelitian/isi penelitian, serta teknik analisis yang digunakan. Perbandingan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

TABEL I.1
KEASLIAN PENELITIAN

NAMA	JUDUL	TUJUAN	MATERI	TEKNIK ANALISIS
Retno Widjajanti 2000	Penataan Fisik Aktivitas PKL pada kawasan komersial di Pusat Kota (Studi Kasus Simpang Lima Semarang)	Menyusun penataan fisik PKL di kawasan komersial	<ul style="list-style-type: none"> • karakteristik aktivitas PKL • kebutuhan PKL 	Deskriptif kuantitatif
Ari Sulistiyo Budi 2005	Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL serta Persepsi Masyarakat Sekitar di Kota Pemasang	mengetahui karakteristik dan preferensi PKL pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah, serta persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL.	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik PKL • Persepsi masyarakat • Preferensi PKL • Hubungan antara preferensi PKL dengan masyarakat 	Deskriptif kuantitatif dengan distribusi frekuensi, analisis tabulasi silang dengan chi kuadrat, deskriptif kualitatif
Handoyo, 2011	Eksistensi Pedagang Kaki Lima : Studi Tentang Kontribusi Modal Sosial Terhadap resistensi PKL di Semarang	Mengetahui resistensi PKL terhadap kebijakan Pemkot Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • kontribusi PKL • Kebijakan publik • Alasan resistensi PKL • Bentuk resistensi • Jenis modal sosial yang menjadi kekuatan PKL 	Deskriptif Kualitatif
Octora Lintang Surya 2013	Formalisasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima Semarang	menemukan karakteristik berlokasi PKL di area formal Simpang lima semarang	<ul style="list-style-type: none"> • karakteristik konsumen • karakteristik aktivitas dan ruang usaha PKL • karakteristik berlokasi PKL 	Analisis deskriptif, metode kuantitatif dengan cross tab dan distribusi frekuensi

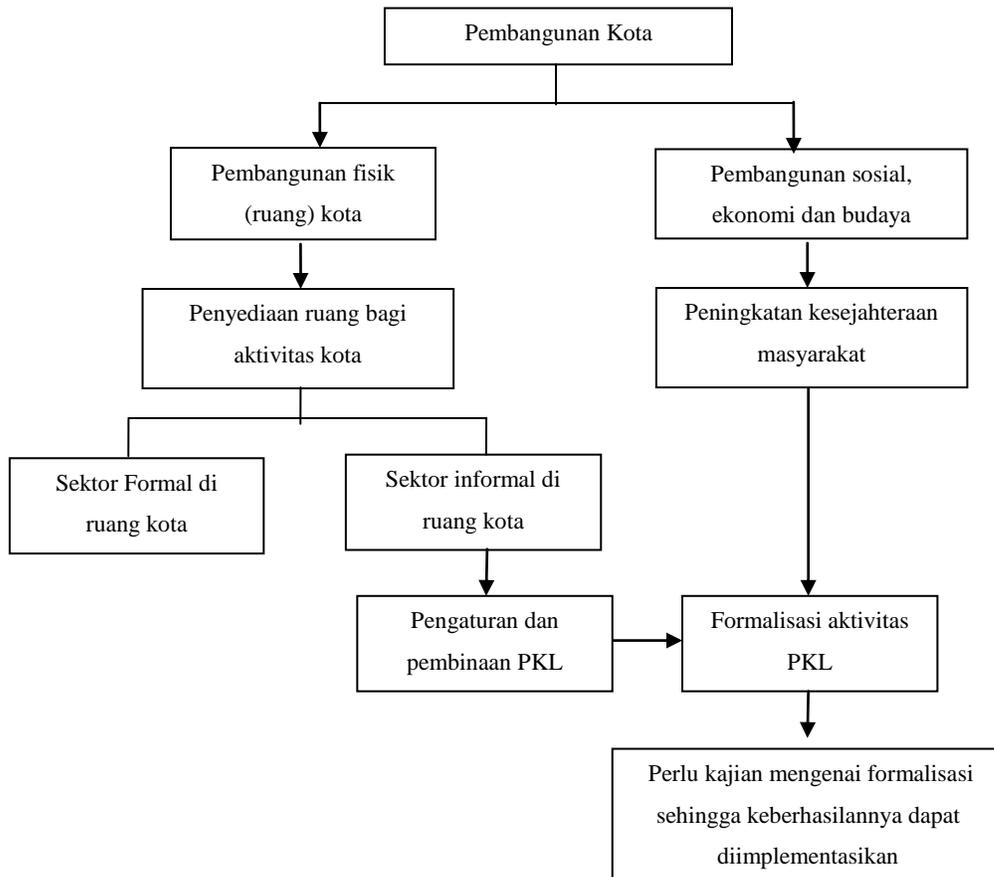
LANJUTAN :

NAMA	JUDUL	TUJUAN	MATERI	TEKNIK ANALISIS
Nurani Nurul Hidayati, 2013	Kajian Dampak Kebijakan Penataan PKL di kawasan Jalan Kartini Semarang	Mengevaluasi kondisi PKL dengan kriteria kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • kriteria evaluasi kebijakan • kondisi aktivitas PKL 	Deskriptif Kualitatif
Nurani Nurul Hidayati, 2014	Kajian Formalisasi PKL di Kawasan Pasar Waru Semarang	Mengkaji proses formalisasi dan peranannya bagi keberlangsungan aktivitas PKL yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • kesesuaian lokasi aktivitas formal PKL • proses formalisasi • bentuk dan manfaat formalisasi PKL 	Deskriptif Kualitatif

Sumber : Analisis Penyusun, 2014

1.6 Posisi Penelitian

Dalam pembangunan wilayah dan kota, pedagang kaki lima termasuk dalam objek sekaligus subjek yang digunakan dalam pembangunan. Pedagang kaki lima yang merupakan fenomena perkotaan, terus berkembang sebagai bagian dari aktivitas perekonomian kota yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat. Pengaturan pedagang kaki lima menjadi salah satu upaya yang dapat digunakan guna mendukung keberhasilan pembangunan kota, termasuk pengentasan kemiskinan yang ada.



Sumber : Analisis Penyusun, 2014

GAMBAR 1.2.
POSISI PENELITIAN

1.7 Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

- Bagi bidang Pembangunan Wilayah dan Kota

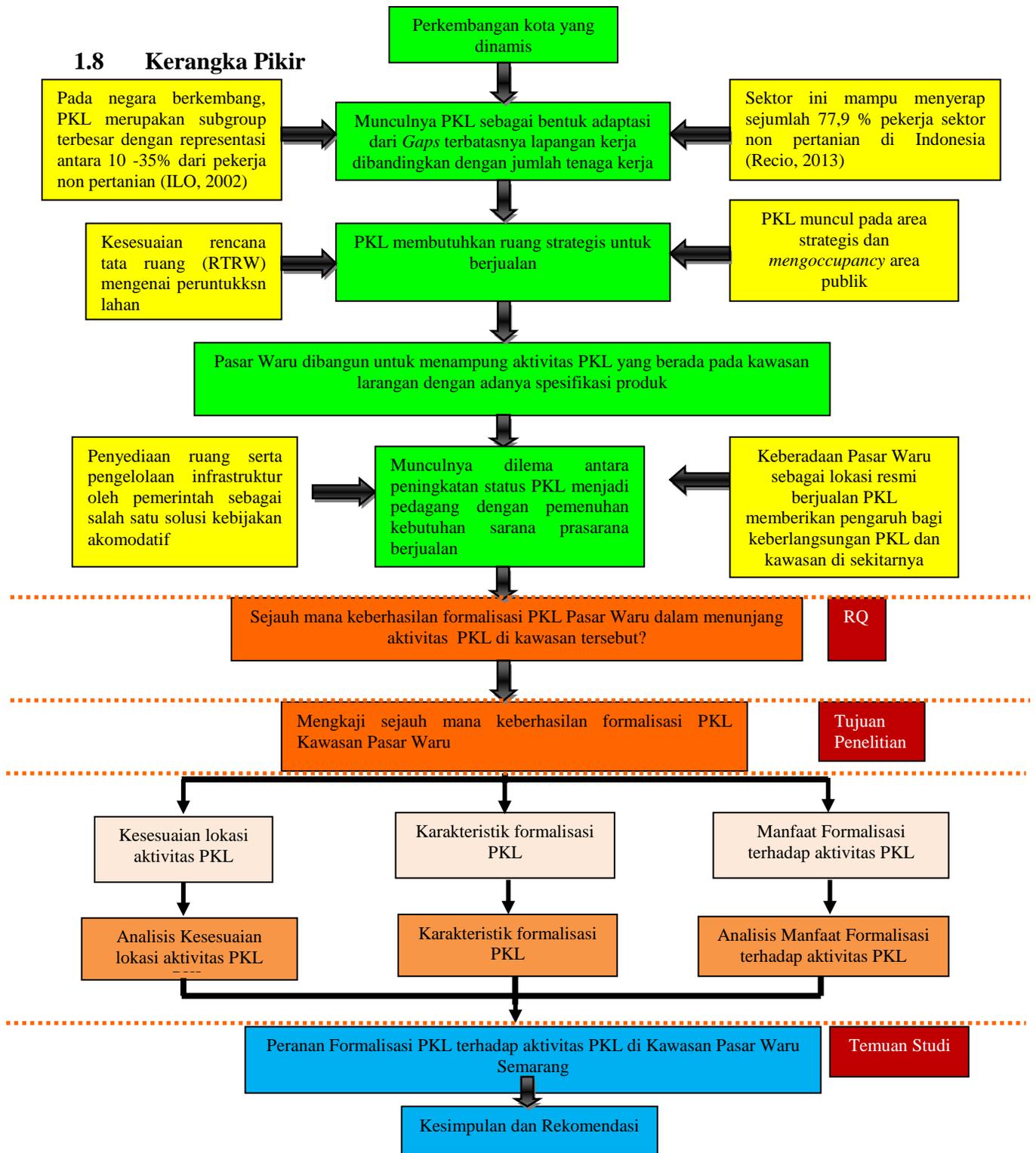
Penelitian ini berhubungan dengan kepentingan umum dalam aspek pembangunan kota khususnya mengenai peranan lokasi dalam aktivitas PKL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan formalisasi dalam penataan pedagang kaki lima, sebagai objek pembangunan. Pada penelitian ini dapat diketahui *lesson learned* dari formalisasi PKL menjadi pedagang resmi yang ada di Kawasan Pasar Waru Semarang. Teori yang dihasilkan dari penelitian ini berguna dalam

urban design pada khususnya sehingga dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan ataupun kegagalan dalam formalisasi PKL yang telah disesuaikan dengan kebutuhan PKL tersebut. Dengan adanya penelitian ini, dapat digunakan sebagai salah satu *resources* untuk mengoptimalkan potensi PKL melalui kajian ilmiah.

- Bagi Pemerintah

Pemerintah berperan sebagai penentu kebijakan sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan selanjutnya. Penelitian ini dapat menunjukkan mengenai pentingnya formalisasi bagi PKL maupun dalam penyusunan program pemerintah lainnya sehingga dapat dijadikan rekomendasi bagi pelaksanaan program. Berhasil atau tidaknya suatu formalisasi juga dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

1.8 Kerangka Pikir



Sumber: Analisis Penyusun, 2014

**GAMBAR 1.3.
KERANGKA PIKIR**

1.9 Metode Penelitian

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif untuk mengkaji objek secara mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya, prosedur ini menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, maupun data yang telah disusun sebelumnya seperti hasil sensus (Suryana, 2007). Penelitian kualitatif memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh untuk menghasilkan suatu kesimpulan dalam konteks waktu dan situasi tertentu, tidak mengutamakan kuantifikasi namun menggunakan penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang dikaji secara empirik (Sudjana, 2004).

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) antara lain:

- a) memiliki sifat natural setting yakni data dikumpulkan secara langsung apa adanya dan peneliti memahami subjek dalam waktu yang cukup lama. Peneliti berpendapat bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipahami sebaik baiknya apabila perbuatan tersebut terjadi secara alamiah.
- b) Peneliti sebagai instrumen, baik dari pengumpulan data hingga analisis data yang dilakukan.
- c) Bersifat deskriptif, yakni data yang dihasilkan merupakan suatu fenomena dan tidak menunjukkan angka korelasi antar variabel seperti pada penelitian kuantitatif. Peneliti berupaya menggunakan seluruh informasi pada kumpulan data dan tidak berusaha mengganti dengan simbol angka.
- d) Menitikberatkan pada proses, penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada gejala proses daripada output yang dihasilkan proses tersebut. Peneliti lebih fokus pada suatu fenomena berkembang menjadi *common sense*.

- e) Analisis data secara induktif, yang memberikan kelebihan penemuan kenyataan lebih cepat, membuat hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian lebih eksplisit dan dapat memperkuat hubungan antar konsep.
- f) Desain bersifat sementara, sehingga penyusunan desain dilakukan secara terus menerus yang disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Desain yang disusun tidak kaku dan dapat diubah sesuai kebutuhan.

Langkah penelitian kualitatif adalah sebagai berikut (Mahammit dalam Suryana, 2007) adalah:

- 1) Menentukan permasalahan
- 2) Melakukan studi literatur
- 3) Penetapan lokasi
- 4) Studi pendahuluan
- 5) Penetapan metode pengumpulan data; observasi, wawancara, dokumen, diskusi terarah
- 6) Analisa data selama penelitian
- 7) Analisa data setelah; validasi dan reliabilitas
- 8) Hasil yang berupa cerita, personal, deskripsi tebal, naratif, dapat dibantu tabel frekuensi.

1.9.2. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan survey dimana tahapan ini merupakan tahapan yang cukup panjang karena dilakukan secara berulang- ulang hingga mencapai suatu jawaban yang konsesus. Dalam penelitian kualitatif, sebagai data formal adalah kata – kata, kalimat dan wacana (Sudjana, 2004). Oleh karena itu, pengumpulan data yang digunakan lebih banyak berasal dari data primer yang didapatkan melalui observasi lapangan dan wawancara kepada narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Narasumber yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah PKL di Kawasan Pasar Waru serta instansi maupun lembaga yang mengelola PKL itu sendiri agar mampu memperoleh data yang aktual mengenai pemenuhan kebutuhan PKL tersebut. Untuk melengkapi informasi yang

dibutuhkan, peneliti juga menggunakan data pendukung berupa data sekunder yang didapatkan melalui dokumen yang telah ada sebelumnya.

1. Survei data primer

Metode yang dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap PKL maupun instansi atau lembaga yang berpengaruh terhadap aktivitas PKL tersebut. Selain itu observasi lapangan juga dilakukan guna mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi nyata yang ada di lapangan.

Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan dapat berupa kegiatan:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek berada dan biasa melakukan aktivitasnya. Observasi bertujuan untuk mengeksplorasi gambaran permasalahan secara sistematis yang dilakukan berdasar prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain. Pemanfaatan teknologi informasi diperlukan dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan, seperti pemanfaatan Kamera dan *Handy Camera*.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah untuk memperoleh makna yang rasional, maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara berstruktur, namun responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural. Dalam proses wawancara ini didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan audio visual, untuk meningkatkan kebernilaian dari data yang diperoleh. Wawancara ditunjukkan kepada PKL sebagai objek penelitian, Instansi seperti Dinas Pasar yang terkait langsung, BAPPEDA Kota Semarang sebagai badan yang bergerak di bidang pembangunan serta Kelurahan Sawah Besar di Kaligawe terkait lokasi aktivitas PKL.

2. Survei data sekunder

Survei data sekunder bertujuan untuk mendukung informasi yang akan dicari. Untuk data sekunder dapat diperoleh melalui instansi terkait langsung seperti BPS Kota Semarang, Dinas Pasar Kota Semarang, BAPPEDA Kota Semarang serta Kelurahan. Selain itu, data kebijakan mengenai peraturan Kota Semarang serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang bersifat mendukung seperti buku, majalah, surat kabar dan penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai literature untuk meringkai penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

1.9.3. Penentuan Narasumber

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek ataupun objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dan dipelajari peneliti untuk ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah PKL di Kawasan Pasar Waru Semarang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Random Sampling/Non Probability Sampling. Non Random Sampling adalah metode yang tidak didasarkan pada mekanisme yang random dalam pemilihan sampel penelitian. Pada Non Random Sampling ini sampel dipilih karena pertimbangan-pertimbangan tidak acak, seperti kesesuaian sampel dengan kriteria-kriteria yang dirumuskan peneliti. Non random sampling dipilih dengan tujuan agar data yang didapatkan untuk penelitian ini benar benar bersifat *reliable* karena menggali fakta di lapangan untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Terdapat beberapa alasan situasional yang menyebabkan sulitnya menggunakan populasi dalam penelitian (Herdiansyah, 2009) :

1. Populasi terlalu besar baik kuantitas maupun kompleksitasnya
2. Terbatasnya waktu penelitian
3. Pertimbangan biaya
4. Keterbatasan sumber daya manusia.

Sedangkan metode dalam non random sampling ini menggunakan purposive sampling dalam artian seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Dalam purposive sampling memiliki kriteria sebagai berikut :

- Harus didasarkan pada ciri, sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasi
- Subjek yang diambil harus merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri pada populasi

Penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk menggali informasi secara akurat dan jelas. Narasumber merupakan informan penting dalam kelancaran pengumpulan hingga analisis data dalam penelitian. Kriteria narasumber dalam penelitian ini adalah pedagang yang berjualan di lokasi Pasar Waru selama lebih dari 2 tahun dan merupakan pindahan dari Kartini- Citarum dan Progo. Untuk penelitian ini menggunakan jumlah narasumber tak terbatas sampai informasi yang didapatkan mengalami kejenuhan atau mengalami pengulangan yang terus menerus.

Narasumber dipilih dengan menggunakan *homogenous sampling* yang didasarkan pada jenis barang dagangan yakni klithikan dan non klithikan di Pasar Waru. *Homogenous sampling* dilakukan dengan memilih subjek penelitian atas dasar kesamaan sifat atau karakteristik dari populasinya (Herdiansyah, 2010). Masing-masing pedagang yang telah dikelompokkan tersebut kemudian dijadikan narasumber untuk wawancara maupun observasi yang mendukung. Di Kawasan Pasar Waru terdapat 180-an pedagang klithikan yang masih aktif dan 30-an pedagang non kklithikan yang masih aktif seperti pedagang hiasan pigura, pakaian, ayam dan elektronik. Pada akhirnya kesamaan informasi dari para narasumber akan memberikan jawaban mengapa para pedagang memilih untuk bertahan ataupun pindah ke lokasi lainnya.

Kemudian, untuk memperluas informasi mengenai fenomena yang ada di Kawasan Pasar Waru, maka ditambahkan metode pencarian narasumber melalui *snowballing sampling*. *Snowballing sampling* pada penelitian ini dilakukan secara

sambung menyambung hingga mencapai tujuan yang ditetapkan (Herdiansyah, 2010). Pada penelitian di Kawasan Pasar Waru ini, *snowballing sampling* dilakukan dengan bertanya pada salah satu pedagang seperti Pak Jumani (pedagang klithikan) dan Pak Sujiarto (pedagang klithikan) yang kemudian merekomendasikan untuk mewawancarai Pak Agus Gunawan, Ketua Paguyuban klithikan yang ada di Kawasan Pasar Waru Semarang.

Instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pembuat kebijakan seperti Dinas Pasar Kota Semarang, UPTD terkait serta Bappeda Kota Semarang. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada Organisasi Lokal Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Waru untuk melengkapi informasi sebagai perantara antara Pemerintah dengan anggota organisasi yakni Pedagang Kaki Lima itu sendiri.

TABEL I.2
KEBUTUHAN DATA

No.	Sasaran	Kisi - kisi	Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
1.	Kajian kesesuaian lokasi aktivitas PKL Kawasan Pasar Waru Semarang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan Lahan Kawasan ▪ Rencana Tata Ruang ▪ Site Kawasan Pasar Waru ▪ Harga lahan sekitar kawasan Pasar Waru 	<ul style="list-style-type: none"> • Justifikasi Pemilihan Lokasi Pasar Waru • Peta Penggunaan Lahan Time Series • Harga Lahan Time Series • Fungsi Kawasan • Site kawasan Pasar Waru Semarang • Peta topografi Kecamatan Gayamsari • Data trayek transportasi umum di sekitar kawasan Pasar Waru • Kondisi lingkungan di sekitar kawasan Pasar Waru • Jumlah pengunjung Pasar Waru 	Data Primer, Data Sekunder	Dokumentasi, Wawancara, Observasi, Survei instansional	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Kota Semarang, • UPTD terkait • Dinas Pasar Kota Semarang, • Dinas Perhubungan Kota Semarang • BPN Kota Semarang • Kelurahan Kaligawe Semarang • Kecamatan Gayamsari
2.	Kajian Karakteristik formalisasi PKL Kawasan Pasar Waru Semarang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Latar belakang formalisasi ▪ Jenis barang dagangan PKL ▪ Waktu berjualan PKL ▪ Sarana berdagang PKL ▪ Omzet PKL ▪ Distribusi barang 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis dagangan PKL di Kawasan Pasar Waru • Waktu berjualan PKL di Kawasan Pasar Waru • Asal dan profil pedagang • Pola Pengelolaan PKL di Kawasan Pasar Waru • Sarana berdagang PKL di Kawasan Pasar Waru • Infrastruktur penunjang 	Data Primer, Data Sekunder	Survei instansional, Wawancara instansi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pasar Kota Semarang, • Bappeda Kota Semarang, • PKL Pasar Waru, • lembaga lokal pengelolaan PKL • UPTD terkait

LANJUTAN :

No.	Sasaran	Kisi - kisi	Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dagangan ▪ Retribusi yang dibayarkan 	<ul style="list-style-type: none"> • di kawasan Pasar Waru • Omzet PKL di Kawasan Pasar Waru • Keterkaitan supplier-pedagang • Keterkaitan pedagang-konsumen • Retribusi yang dibayarkan • Pengelompokkan barang dagangan • Pengelolaan organisasional • Peta Tata Guna Lahan Kecamatan Gayamsari • Peta Persebaran Karakteristik PKL 			
3.	Kajian manfaat formalisasi dalam aktivitas PKL Kawasan Pasar Waru Semarang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manfaat berjualan di lokasi tersebut ▪ Keuntungan secara lokasional ▪ Keamanan dan kenyamanan terkait lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaat berjualan di lokasi formal • Keuntungan secara lokasional • Peranan lokasi dalam keberlangsungan aktivitas PKL • Keamanan dan kenyamanan terkait lokasi 	Data primer	Wawancara, Observasi,	<ul style="list-style-type: none"> • PKL Pasar Waru, • lembaga lokal pengelolaan PKL • Bappeda Kota Semarang, • Dinas Pasar Kota Semarang

Sumber : Analisis Penyusun, 2014

1.9.4. Metode Analisis

a. *Metode Analisis Kualitatif*

Penggunaan metode analisis kualitatif dimaksudkan untuk dapat mengetahui kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Dengan demikian peneliti tidak memanipulasi variabel maupun data yang diperoleh dari lapangan. Adapun teknik analisis yang digunakan pada studi ini adalah *Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif*. Metode kualitatif secara deskriptif digunakan dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan secara mendalam tentang kondisi PKL. Deskripsi kualitatif dalam studi ini merupakan intepretasi dari observasi visual mengenai pemenuhan kebutuhan PKL, dengan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan literatur maupun peraturan kebijakan yang berlaku.

b. *Metode Thematic Analisis*

Analisis tematik merupakan analisis yang dilakukan dengan cara pengelompokan data disesuaikan dengan tema tema kecil yang merupakan bagian dari objek penelitian tersebut. Tematik analisis dilakukan dengan mengelompokkan jawaban yang sama berdasar hasil wawancara kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya.

1) Kategori Tema

Merupakan proses pengelompokan tema yang telah disusun ke dalam suatu matriks kategorisasi.

2) Subkategori Tema

Setelah serangkaian proses pada tahapan kategori tema selesai, dilakukan subkategori tema. Tahapan ini membagi tema menjadi beberapa subtema yang lebih praktis dan mudah diterima. Semakin umum suatu tema maka akan semakin banyak menghasilkan subtema.

3) Coding atau pengkodean

Coding merupakan pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis. Pengkodean dilakukan untuk mempermudah penganalisaan data hasil wawancara terhadap narasumber yang berkaitan. Sebagai contohnya G01/C/3. G01 menunjukkan nama narasumber dan posisi atau jabatannya. Huruf C menunjukkan tema yang muncul dan 3 menunjukkan paragraph ke -3 dalam satu narasumber.

4) Verifikasi

Merupakan tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Herdiansyah, 2010). Secara essensial, berisi mengenai seluruh subkategorisasi tema yang tercantum pada tabel kategorisasi. Verifikasi dilakukan dengan tujuan untuk menjaga validitas dan realibilitas penelitian. Validitas memiliki arti keaslian atau autentikasi (Herdiansyah, 2010) yang dapat diwujudkan dengan triangulasi baik metode, dan sumber untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh sumber lain. Realibilitas memiliki arti kesesuaian antara data yang dikemukakan subjek dengan kondisi yang sebenarnya (Herdiansyah, 2010). Untuk memperkuat realibilitas dapat dilakukan dengan *re-checking* pada lapangan, penggalian data yang menggunakan lebih dari satu cara serta menambah informan hingga informasi benar - benar jenuh.

c. *Metode Spatial Analisis*

Analisa spasial merupakan sekumpulan metoda untuk menemukan dan menggambarkan tingkatan/pola dari sebuah fenomena spasial, sehingga dapat dimengerti dengan lebih baik. Analisis spasial berusaha untuk membantu perencana dalam menganalisis kondisi permasalahan berdasarkan data dari

wilayah yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, Analisis spasial digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana tata ruang yang ada di Kawasan Pasar Waru.

1.9.5. Kerangka Analisis



GAMBAR 1.4
KERANGKA ANALISIS

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang disusunnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian yang terbagi menjadi lingkup materi dan lingkup wilayah, keaslian penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian dan sistematika penelitian yang ada. Pada bab ini juga berisi mengenai metode penelitian untuk pencapaian tujuan.

BAB II KAJIAN PERANAN FORMALISASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PASAR WARU SEMARANG

Berisi mengenai literature yang berkaitan dengan formalisasi PKL. Kajian literature ini berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan analisis tahapan berikutnya. Pada akhir bab ini juga dijelaskan mengenai sintesa literature yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kisi-kisi penelitian.

BAB III KAWASAN PASAR WARU SEBAGAI BAGIAN DARI RUANG FORMAL KOTA

Bab ini berisi mengenai kondisi eksisting yang ada di lapangan beserta potensi dan masalah yang ada. Pada bab ini juga dibahas mengenai kondisi perkembangan di sekitar kawasan yang menjadi wilayah studi.

BAB IV KAJIAN FORMALISASI PKL PASAR WARU SEMARANG

Bab ini menjabarkan tentang analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Pada bab analisa ini berisi mengenai kajian kesesuaian lokasi formal PKL Pasar Waru Semarang, Kajian karakteristik formalisasi PKL Pasar Waru Semarang, kajian mengenai manfaat formalisasi yang ada di Kawasan Pasar Waru Semarang. Selain itu, pada bab ini juga berisi mengenai sintesa kajian yang merangkum seluruh temuan kajian di atas.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi sintesa dari penelitian secara keseluruhan yang menghasilkan suatu rekomendasi.